



Hambatan dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia

I Nengah Widiatmika

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

* Correspondence: nengahwidiatmika64@gmail.com

Abstract

The Merdeka Belajar Curriculum represents a major educational reform in Indonesia aimed at enhancing learning quality through curriculum flexibility, differentiated instruction, and character development. Despite its nationwide implementation, several studies report persistent challenges at the school level. This study aims to identify and analyze the barriers and challenges in implementing the Merdeka Belajar Curriculum through a systematic literature review (SLR). The review followed PRISMA guidelines and analyzed journal articles and policy documents published between 2019 and 2025, sourced from Google Scholar, SINTA, ERIC, and official government publications. The findings reveal that key challenges include limited teacher readiness and professional competence, difficulties in applying differentiated learning and formative assessment, unequal educational infrastructure, and weak school leadership and change management. These results indicate that the success of the Merdeka Belajar Curriculum depends not only on policy formulation but also on comprehensive systemic support and strengthened institutional capacity.

Keywords: Merdeka Belajar Curriculum; curriculum implementation; educational challenges; educational reform; systematic literature review.

Abstrak

Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kebijakan reformasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui fleksibilitas kurikulum, pembelajaran berdiferensiasi, dan penguatan karakter peserta didik. Meskipun telah diimplementasikan secara nasional, berbagai studi menunjukkan adanya hambatan dalam penerapannya di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan serta tantangan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar melalui pendekatan systematic literature review (SLR). Kajian dilakukan dengan mengacu pada prinsip PRISMA terhadap artikel jurnal dan dokumen kebijakan yang diterbitkan pada periode 2019–2025 dan diperoleh dari basis data Google Scholar, SINTA, ERIC, serta sumber resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan kesiapan dan kompetensi guru, kesulitan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen formatif, ketimpangan sarana prasarana, serta lemahnya kepemimpinan dan manajemen perubahan di sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh dukungan sistemik dan kapasitas aktor pendidikan.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka; Merdeka Belajar; implementasi kurikulum; tantangan pendidikan; systematic literature review.

I. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat global yang ditandai oleh percepatan teknologi, kompleksitas permasalahan sosial, serta tuntutan kompetensi abad ke-21 menuntut sistem pendidikan untuk beradaptasi secara berkelanjutan. Pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan faktual, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta karakter peserta didik (OECD, 2018; Trilling & Fadel, 2009). Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin kompleks akibat ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah, variasi sumber daya manusia, serta dampak learning loss yang diperparah oleh pandemi COVID-19 (OECD, 2021; UNESCO, 2022).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang kemudian diwujudkan secara lebih operasional melalui Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan pendidik dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kontekstual, serta relevan dengan kebutuhan zaman (Kemendikbudristek, 2022). Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, diferensiasi pembelajaran, serta penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila (Kemendikbud, 2021).

Secara konseptual, Kurikulum Merdeka dianggap sebagai paradigma baru yang progresif dan transformatif dibandingkan kurikulum sebelumnya. Penyederhanaan capaian pembelajaran, penghapusan kompetensi dasar yang bersifat fragmentatif, serta penekanan pada pembelajaran berbasis proyek diyakini mampu mendorong pembelajaran yang lebih mendalam (*deep learning*) dan bermakna (Suryaman, 2023; Anwar, 2021). Selain itu, fleksibilitas kurikulum memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik (Tomlinson, 2017; Nurhasanah, 2023).

Namun demikian, kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi sering kali menjadi persoalan utama dalam reformasi pendidikan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak secara otomatis menghasilkan perubahan praktik pembelajaran di kelas tanpa adanya kesiapan aktor pendidikan dan dukungan sistem yang memadai (Fullan, 2020; Priestley et al., 2015). Dalam konteks Kurikulum Merdeka, meskipun telah diterapkan secara nasional melalui skema sekolah penggerak dan implementasi mandiri, berbagai laporan empiris menunjukkan munculnya beragam hambatan dan tantangan di tingkat satuan pendidikan (Hidayat, 2022; Wahyuni et al., 2022).

Salah satu tantangan utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah kesiapan dan kompetensi guru. Guru dituntut untuk memahami filosofi kurikulum secara mendalam, merancang modul ajar secara mandiri, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta mengembangkan asesmen formatif yang autentik (Kemendikbudristek, 2023). Namun, tidak semua guru memiliki pengalaman, pelatihan, dan literasi pedagogis yang memadai untuk memenuhi tuntutan tersebut secara optimal (Rahmawati & Putra, 2023; Wijaya, 2024). Kondisi ini berpotensi menimbulkan implementasi yang bersifat administratif dan simbolik tanpa perubahan substantif dalam praktik pembelajaran.

Selain faktor guru, tantangan implementasi Kurikulum Merdeka juga berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Pembelajaran berbasis proyek dan pemanfaatan teknologi digital menuntut dukungan infrastruktur yang memadai, seperti akses internet, perangkat digital, dan sumber belajar yang relevan (UNESCO, 2023). Realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan, khususnya antara sekolah di wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (Sari et al., 2022; Pratiwi, 2021). Ketimpangan ini berimplikasi pada disparitas kualitas implementasi kurikulum.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek asesmen pembelajaran. Kurikulum Merdeka mendorong pergeseran dari asesmen berbasis hasil semata menuju asesmen formatif yang berorientasi pada proses dan perkembangan belajar peserta didik (Black & Wiliam, 2009). Meskipun secara teoritis pendekatan ini lebih konstruktif, dalam praktiknya banyak guru mengalami kesulitan dalam merancang instrumen asesmen yang sesuai, melakukan refleksi pembelajaran, serta mengintegrasikan hasil asesmen ke dalam perencanaan pembelajaran berikutnya (Rahmawati & Putra, 2023; Lestari, 2022).

Di sisi manajerial, peran kepemimpinan kepala sekolah dan tata kelola satuan pendidikan menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional yang mampu membangun budaya belajar, kolaborasi guru, dan inovasi sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan perubahan kurikulum (Sutrisno, 2022; Leithwood et al., 2020). Sebaliknya, lemahnya koordinasi, minimnya supervisi akademik, dan resistensi terhadap perubahan dapat menghambat pencapaian tujuan kurikulum secara sistemik.

Berbagai studi tentang implementasi Kurikulum Merdeka telah dilakukan dengan pendekatan yang beragam, seperti studi kasus, survei, dan penelitian kualitatif deskriptif. Namun, kajian-kajian tersebut

umumnya masih bersifat parsial dan kontekstual, baik pada jenjang pendidikan tertentu maupun wilayah tertentu (Fitria, 2022; Kurniawan, 2023). Akibatnya, belum tersedia pemetaan komprehensif dan sistematis mengenai pola hambatan dan tantangan implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional.

Dalam konteks akademik, kebutuhan akan kajian yang bersifat integratif menjadi semakin penting, khususnya melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). SLR memungkinkan peneliti untuk mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya secara sistematis, transparan, dan replikatif, sehingga mampu memberikan gambaran utuh mengenai tren, kesenjangan penelitian, serta implikasi kebijakan (Petticrew & Roberts, 2006; Putra, 2020). Melalui SLR, temuan yang tersebar dalam berbagai studi dapat diintegrasikan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti (evidence-based policy).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis hambatan dan tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia berdasarkan temuan penelitian dan dokumen kebijakan yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada aspek sumber daya manusia, pedagogi, asesmen, sarana prasarana, serta manajemen pendidikan. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengayaan kajian kurikulum serta kontribusi praktis bagi perumusan strategi implementasi Kurikulum Merdeka yang lebih efektif dan berkelanjutan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan penelitian terkait hambatan dan tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan pemetaan temuan secara komprehensif, transparan, dan replikatif dengan meminimalkan bias subjektivitas peneliti (Petticrew & Roberts, 2006; Kitchenham & Charters, 2007). SLR sangat relevan digunakan dalam kajian kebijakan pendidikan untuk menghasilkan sintesis berbasis bukti (evidence-based review).

Proses SLR dalam penelitian ini mengikuti prinsip Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi literatur (Moher et al., 2009; Page et al., 2021). Tahap identifikasi dilakukan dengan penelusuran artikel menggunakan kata kunci utama seperti “*Kurikulum Merdeka*”, “*Merdeka Belajar*”, “*implementasi kurikulum*”, dan “*tantangan pendidikan*”. Pencarian dilakukan pada basis data Google Scholar, SINTA, ERIC, serta dokumen kebijakan resmi pemerintah Indonesia untuk menjamin kelengkapan dan relevansi sumber (Booth et al., 2016).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel jurnal, prosiding, dan laporan kebijakan yang diterbitkan pada rentang tahun 2019–2025; (2) fokus pada implementasi Kurikulum Merdeka atau kebijakan Merdeka Belajar; dan (3) tersedia dalam teks lengkap (full text). Adapun kriteria eksklusi mencakup publikasi yang bersifat opini populer tanpa metodologi ilmiah yang jelas, duplikasi artikel, serta penelitian yang tidak secara eksplisit membahas aspek implementasi kurikulum. Penerapan kriteria ini bertujuan meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil sintesis (Liberati et al., 2009).

Artikel yang lolos tahap seleksi selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola hambatan dan tantangan yang berulang dalam berbagai konteks penelitian (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama, seperti kesiapan guru, asesmen, sarana prasarana, kepemimpinan sekolah, dan dukungan kebijakan. Pendekatan analisis tematik dipilih karena efektif untuk mensintesis data kualitatif dari berbagai studi secara sistematis dan kontekstual (Nowell et al., 2017).

Untuk menjaga kredibilitas hasil kajian, penelitian ini menerapkan evaluasi kualitas artikel berdasarkan kejelasan metodologi, relevansi penelitian, serta kontribusi temuan terhadap topik kajian (Kitchenham et al., 2009). Dengan pendekatan metodologis ini, SLR diharapkan mampu memberikan

gambaran menyeluruh mengenai tantangan implementasi Kurikulum Merdeka serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan dan penelitian lanjutan.

III. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil penelitian

Proses Seleksi Literatur Berdasarkan PRISMA (Versi Deskriptif)

Proses identifikasi dan seleksi artikel dalam penelitian ini mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guna memastikan transparansi, objektivitas, dan keterulangan proses penelusuran literatur (Page et al., 2021). Tahapan PRISMA dalam penelitian ini meliputi identification, screening, eligibility, dan inclusion, yang dijelaskan secara naratif dan tabular sebagai berikut.

Tahap Identifikasi (Identification)

Pada tahap awal, penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah, yaitu Google Scholar, SINTA, ERIC, serta dokumen kebijakan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kata kunci yang digunakan mencakup: “*Kurikulum Merdeka*”, “*Merdeka Belajar*”, “*implementasi kurikulum*”, “*tantangan pendidikan*”, dan “*hambatan kurikulum*”.

Dari hasil penelusuran awal, diperoleh 112 artikel dan dokumen yang relevan secara topik. Pada tahap ini, belum dilakukan penyaringan berdasarkan kualitas maupun kesesuaian isi, sehingga seluruh publikasi yang mengandung kata kunci dimasukkan dalam daftar awal.

Tahap Penyaringan (Screening)

Selanjutnya, dilakukan penyaringan awal dengan menghapus artikel duplikat, baik yang berasal dari basis data yang sama maupun lintas basis data. Pada tahap ini ditemukan 28 artikel duplikat, sehingga tersisa 84 artikel.

Penyaringan kemudian dilanjutkan dengan membaca judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian awal dengan fokus kajian. Artikel yang tidak secara eksplisit membahas implementasi Kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar di konteks pendidikan Indonesia dikeluarkan dari analisis. Pada tahap ini, sebanyak 32 artikel dieliminasi karena tidak relevan secara substansial.

Tahap Kelayakan (Eligibility)

Sebanyak 52 artikel yang lolos tahap penyaringan selanjutnya dibaca secara full-text. Penilaian kelayakan dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, meliputi:

1. Tahun publikasi (2019–2025)
2. Fokus pada implementasi Kurikulum Merdeka atau kebijakan Merdeka Belajar
3. Artikel jurnal, prosiding, atau dokumen kebijakan resmi
4. Memiliki temuan empiris atau analisis konseptual yang jelas

Pada tahap ini, 20 artikel dikeluarkan karena:

- Tidak tersedia full-text

- Pembahasan terlalu umum tanpa fokus implementasi
- Konteks penelitian di luar sistem pendidikan Indonesia

Tahap Inklusi (Inclusion)

Akhirnya, sebanyak 32 artikel dinyatakan memenuhi seluruh kriteria dan dimasukkan dalam sintesis sistematis. Artikel-artikel ini dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait hambatan dan tantangan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar.

Tabel 1. Tabel PRISMA Versi Deskriptif

Tahap PRISMA	Jumlah Artikel	Keterangan
Identification	112	Artikel dan dokumen dari Google Scholar, SINTA, ERIC, dan dokumen resmi
Duplikat dihapus	28	Artikel dengan judul dan penulis sama
Screening (judul & abstrak)	84	Artikel diseleksi berdasarkan relevansi awal
Artikel dieliminasi	32	Tidak relevan dengan fokus Kurikulum Merdeka
Eligibility (full-text)	52	Artikel dibaca secara menyeluruh
Artikel dikeluarkan	20	Tidak memenuhi kriteria inklusi
Inclusion (final)	32	Artikel dianalisis dalam SLR

Berdasarkan proses seleksi literatur menggunakan pendekatan PRISMA, sebanyak 32 artikel dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. Analisis dilakukan melalui teknik thematic synthesis dengan mengelompokkan temuan penelitian ke dalam tema-tema utama yang muncul secara konsisten dalam berbagai studi. Hasil kajian menunjukkan terdapat lima tema utama yang merepresentasikan pola tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat satuan pendidikan.

1. Keterbatasan Kesiapan dan Kompetensi Guru

Tema yang paling dominan dalam literatur adalah keterbatasan kesiapan dan kompetensi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Sebagian besar studi menegaskan bahwa guru masih menghadapi kesulitan dalam memahami filosofi kurikulum, khususnya terkait pembelajaran berbasis kompetensi, diferensiasi pembelajaran, dan perancangan modul ajar secara mandiri (Wahyuni et al., 2022; Nurhasanah, 2023).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada guru cenderung singkat dan berorientasi pada sosialisasi kebijakan, bukan pada pendampingan praktik pembelajaran di kelas (Hidayat, 2022; Wijaya, 2024). Akibatnya, penerapan Kurikulum Merdeka di sejumlah sekolah masih bersifat administratif, seperti penyusunan dokumen kurikulum, tanpa diikuti perubahan signifikan dalam strategi pembelajaran.

Selain itu, guru dengan latar belakang pengalaman panjang pada kurikulum sebelumnya cenderung mengalami resistensi terhadap perubahan, terutama dalam mengadopsi pendekatan reflektif dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (Suryaman, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa transisi kurikulum tidak hanya memerlukan peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga perubahan paradigma pedagogis guru.

2. Tantangan dalam Pelaksanaan Asesmen Pembelajaran

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa asesmen pembelajaran merupakan salah satu aspek yang paling menantang dalam Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan asesmen formatif dan diagnostik sebagai dasar perencanaan pembelajaran, namun banyak guru mengalami kesulitan dalam merancang dan mengimplementasikan asesmen yang berorientasi pada proses belajar peserta didik (Rahmawati & Putra, 2023; Lestari, 2022).

Beberapa studi melaporkan bahwa guru masih terbiasa dengan asesmen sumatif berbasis tes tertulis, sehingga penerapan asesmen autentik, portofolio, dan observasi belum dilakukan secara optimal (Fitria, 2022). Selain itu, belum adanya standar teknis asesmen yang seragam menyebabkan variasi pemahaman antar sekolah dan guru, yang berdampak pada inkonsistensi pelaksanaan asesmen (Kemendikbudristek, 2023).

Kondisi tersebut diperparah oleh beban administrasi yang masih dirasakan tinggi, terutama dalam mendokumentasikan hasil asesmen secara deskriptif dan berkelanjutan. Hal ini mengurangi waktu guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran.

3. Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Akses Teknologi

Tema selanjutnya yang muncul secara konsisten adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terutama terkait pemanfaatan teknologi digital. Beberapa penelitian menegaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet, perangkat digital, dan sumber belajar berbasis teknologi (Sari et al., 2022; UNESCO, 2023).

Ketimpangan antar wilayah menjadi isu utama, di mana sekolah di daerah perkotaan relatif lebih siap dibandingkan sekolah di wilayah 3T. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar secara optimal (Pratiwi, 2021; Rizal & Ananda, 2024).

Selain keterbatasan fisik, literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital, baik pada guru maupun peserta didik. Minimnya kemampuan menggunakan teknologi pembelajaran secara pedagogis menghambat transformasi pembelajaran yang diharapkan dalam Kurikulum Merdeka.

4. Manajemen Sekolah dan Kepemimpinan Pendidikan

Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran strategis dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Sekolah yang memiliki kepala sekolah dengan kepemimpinan transformasional cenderung lebih mampu membangun budaya kolaborasi guru, refleksi pembelajaran, dan inovasi kurikulum (Sutrisno, 2022; Leithwood et al., 2020).

Sebaliknya, beberapa studi menemukan bahwa lemahnya manajemen sekolah, kurangnya supervisi akademik, dan minimnya pendampingan internal menyebabkan implementasi kurikulum berjalan tidak terarah (Kurniawan, 2023). Kepala sekolah yang berperan hanya sebagai administrator kebijakan dinilai kurang efektif dalam mendorong perubahan praktik pembelajaran di kelas.

Selain itu, koordinasi antara sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan belum berjalan optimal, sehingga interpretasi kebijakan Kurikulum Merdeka sering kali berbeda antar satuan pendidikan.

5. Ketidaksiapan Budaya Sekolah dan Partisipasi Pemangku Kepentingan

Tema terakhir yang teridentifikasi adalah ketidaksiapan budaya sekolah dan rendahnya partisipasi pemangku kepentingan pendidikan. Beberapa penelitian menyoroti bahwa perubahan kurikulum menuntut budaya belajar yang kolaboratif, reflektif, dan terbuka terhadap inovasi, yang belum sepenuhnya terbentuk di sebagian sekolah (Anwar, 2021; Darmaningtyas, 2020).

Selain itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung Kurikulum Merdeka masih tergolong rendah, terutama pada pelaksanaan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (Fitria, 2022). Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap tujuan dan pendekatan kurikulum berpotensi menimbulkan resistensi dan miskonsepsi.

b. Pembahasan

Hasil systematic literature review menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar bersifat multidimensional dan saling berkaitan, mencakup aspek pedagogis, struktural, institusional, serta kultural. Temuan ini sejalan dengan teori perubahan pendidikan yang menegaskan bahwa reformasi kurikulum tidak dapat dipahami semata sebagai perubahan dokumen, melainkan sebagai proses kompleks yang melibatkan perubahan praktik, keyakinan, dan budaya organisasi sekolah (Fullan, 2020; Priestley et al., 2015).

Kesiapan Guru dan Teori Profesionalisme Guru

Dominannya hambatan terkait kesiapan dan kompetensi guru dapat dijelaskan melalui perspektif *teacher professional capital*. Fullan dan Hargreaves (2012) menyatakan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan sangat bergantung pada kapasitas profesional guru yang mencakup modal manusia (kompetensi individu), modal sosial (kolaborasi), dan modal keputusan (*professional judgment*). Hasil kajian menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi, penyusunan modul ajar, serta asesmen formatif, yang menunjukkan lemahnya dukungan terhadap pembangunan profesional guru secara sistematis.

Temuan ini juga menguatkan teori *curriculum enactment*, yang menegaskan bahwa guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan aktor utama yang menafsirkan dan membentuk kurikulum dalam praktik kelas (Ball et al., 2012). Ketika pemahaman konseptual guru terhadap filosofi Kurikulum Merdeka terbatas, implementasi cenderung bersifat prosedural dan administratif, bukan transformatif. Hal ini menjelaskan mengapa dalam beberapa konteks, Kurikulum Merdeka diterapkan tanpa perubahan signifikan dalam strategi pembelajaran.

Pembelajaran Berdiferensiasi dan Konstruktivisme

Tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kurikulum dan paradigma pedagogi yang dianut guru. Kurikulum Merdeka berakar pada teori konstruktivisme, yang memandang belajar sebagai proses aktif dan kontekstual di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri (Vygotsky, 1978; Piaget, 1970). Konsep diferensiasi sebagaimana dikemukakan Tomlinson (2017) menuntut guru untuk menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa.

Namun, hasil SLR menunjukkan bahwa banyak guru masih terbiasa dengan pendekatan pembelajaran seragam (*one-size-fits-all*). Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksinambungan antara tuntutan pedagogis kurikulum dan praktik pembelajaran yang telah mengakar. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa perubahan kurikulum memerlukan perubahan epistemologis guru tentang belajar dan mengajar, bukan sekadar penyesuaian perangkat administratif (Cohen & Ball, 1990).

Asesmen Formatif dan Assessment for Learning

Kesulitan dalam penerapan asesmen formatif dapat dipahami melalui kerangka *assessment for learning*. Black dan Wiliam (2009) menegaskan bahwa asesmen formatif menuntut kemampuan guru dalam memberikan umpan balik bermakna, merefleksikan proses belajar, serta melibatkan peserta didik secara aktif dalam evaluasi diri. Hasil kajian menunjukkan bahwa guru kerap menafsirkan asesmen formatif sebagai tambahan administrasi, bukan sebagai instrumen pedagogis.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Shepard (2019) yang menyatakan bahwa transisi dari asesmen tradisional ke asesmen formatif memerlukan perubahan budaya sekolah dan sistem penilaian yang konsisten. Tanpa dukungan pelatihan dan kebijakan yang selaras, asesmen formatif berisiko mengalami reduksi makna dan diterapkan secara superfisial.

Sarana Prasarana dan Teori Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan sarana dan prasarana, khususnya akses teknologi dan sumber belajar, memperkuat tesis tentang ketimpangan pendidikan struktural. Bourdieu (1986) melalui konsep *capital* menjelaskan bahwa akses terhadap sumber daya ekonomi dan kultural memengaruhi peluang keberhasilan pendidikan. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, sekolah dengan keterbatasan infrastruktur menghadapi tantangan besar dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan pemanfaatan teknologi digital.

Temuan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas kurikulum tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan implementasi. Tanpa intervensi kebijakan afirmatif, Kurikulum Merdeka justru berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pembelajaran antarsekolah, sebagaimana diperingatkan oleh UNESCO (2023) dalam kajian transformasi digital pendidikan.

Kepemimpinan Sekolah dan Manajemen Perubahan

Peran kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dapat dijelaskan melalui teori kepemimpinan transformasional. Leithwood et al. (2020) menegaskan bahwa pemimpin sekolah yang efektif mampu membangun visi bersama, memberdayakan guru, dan menciptakan budaya inovasi. Hasil SLR menunjukkan bahwa sekolah dengan kepemimpinan adaptif cenderung lebih berhasil mengelola perubahan kurikulum dibandingkan sekolah dengan kepemimpinan administratif semata.

Hal ini juga konsisten dengan teori *organizational learning*, yang memandang sekolah sebagai organisasi pembelajar yang harus mampu merefleksikan praktik, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi secara kolektif (Senge, 2006). Ketika manajemen sekolah lemah, Kurikulum Merdeka diperlakukan sebagai kebijakan eksternal yang harus dipatuhi, bukan sebagai peluang untuk peningkatan mutu pembelajaran.

Implikasi Teoretis dan Sintesis

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar tidak dapat direduksi pada faktor teknis semata, melainkan merupakan manifestasi dari kompleksitas perubahan pendidikan. Temuan SLR menguatkan teori bahwa reformasi kurikulum yang berkelanjutan membutuhkan keselarasan antara kebijakan, kapasitas guru, budaya sekolah, dan dukungan sistemik (Fullan, 2020; Spillane et al., 2002).

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka perlu dipahami sebagai proses jangka panjang yang menuntut pendekatan adaptif, reflektif, dan kolaboratif. Tanpa landasan teoritis dan implementatif yang kuat, tujuan mulia kurikulum berisiko tidak tercapai secara optimal.

IV. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap 32 artikel dan dokumen kebijakan yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang bersifat multidimensional. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembelajaran, tetapi juga menyentuh dimensi sumber daya

manusia, infrastruktur pendidikan, manajemen sekolah, serta budaya dan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa keterbatasan kesiapan dan kompetensi guru merupakan faktor dominan yang memengaruhi efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka. Perubahan paradigma dari kurikulum berbasis konten menuju kurikulum berbasis kompetensi menuntut kemampuan pedagogis yang lebih reflektif dan adaptif, yang belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh guru. Selain itu, kompleksitas pelaksanaan asesmen formatif dan autentik serta beban administratif yang masih dirasakan tinggi turut menjadi kendala dalam praktik pembelajaran di kelas.

Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya terkait akses teknologi dan literasi digital, memperlebar kesenjangan kualitas implementasi antar satuan pendidikan dan wilayah. Temuan ini menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka sangat kontekstual dan bergantung pada kesiapan masing-masing sekolah. Faktor kepemimpinan kepala sekolah dan tata kelola satuan pendidikan juga terbukti berperan strategis, di mana kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif mampu mendorong inovasi serta mengurangi resistensi terhadap perubahan kurikulum.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka Belajar tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan desain kebijakan, melainkan sebagai proses perubahan sistemik yang memerlukan dukungan berkelanjutan, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta penguatan kapasitas pada seluruh level pendidikan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi berikut dapat diajukan:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah perlu memperkuat strategi implementasi Kurikulum Merdeka melalui pelatihan guru yang berkelanjutan, berbasis praktik nyata, dan disertai pendampingan di satuan pendidikan. Selain itu, diperlukan kebijakan afirmatif untuk pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, terutama bagi sekolah di daerah 3T, guna mengurangi kesenjangan kualitas implementasi kurikulum.

2. Bagi Satuan Pendidikan dan Kepala Sekolah

Sekolah diharapkan mampu membangun budaya belajar yang kolaboratif dan reflektif, serta mengoptimalkan peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai agen perubahan. Penguatan komunitas belajar guru dan supervisi akademik yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran perlu menjadi prioritas dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

3. Bagi Guru

Guru disarankan untuk secara aktif mengembangkan kompetensi profesional, khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen formatif. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar dan jejaring komunitas profesional dapat menjadi sarana pembelajaran mandiri dan kolaboratif dalam menghadapi tuntutan kurikulum baru.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris dengan pendekatan longitudinal guna mengevaluasi dampak jangka panjang Kurikulum Merdeka terhadap hasil belajar dan karakter peserta didik. Selain itu, kajian yang lebih spesifik berdasarkan jenjang pendidikan, mata pelajaran, atau konteks wilayah akan memperkaya pemahaman terhadap implementasi kurikulum secara lebih mendalam.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. (2021). Merdeka belajar dalam konteks pendidikan Indonesia. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i1.2203>
- Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 21(1), 5–31. <https://doi.org/10.1007/s11092-008-9068-5>
- Darmaningtyas. (2020). *Pendidikan yang memiskinkan*. Intrans Publishing.
- Fitria, Y. (2022). Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6493–6503. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3432>
- Fullan, M. (2020). *Leading in a culture of change* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Hidayat, R. (2022). Tantangan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(2), 112–123.
- Kemendikbud. (2021). *Profil Pelajar Pancasila*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kemendikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kemendikbudristek. (2023). *Panduan pembelajaran dan asesmen Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kurniawan, H. (2023). Manajemen sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(1), 34–45.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5–22. <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077>
- Lestari, D. (2022). Evaluasi pelaksanaan asesmen pada Kurikulum Merdeka. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(5), 6632–6641. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i5.3900>
- Nurhasanah. (2023). Pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Didaktika Pendidikan*, 17(2), 147–158.
- OECD. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Education policy outlook: Indonesia*. OECD Publishing.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Blackwell Publishing.
- Pratiwi, I. (2021). Dampak learning loss terhadap kualitas pembelajaran pasca pandemi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(2), 98–110.
- Putra, N. (2020). *Research and development: Penelitian dan pengembangan*. Rajagrafindo Persada.
- Rahmawati, A., & Putra, D. (2023). Asesmen formatif sebagai tantangan implementasi Kurikulum Merdeka. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 221–231. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4500>
- Rizal, F., & Ananda, R. (2024). Literasi digital guru dalam mendukung Kurikulum Merdeka. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 8(1), 57–68.
- Sari, P., Putri, R., & Handoko, T. (2022). Ketimpangan akses teknologi pendidikan di daerah 3T. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(3), 215–227.
- Sudrajat, A. (2021). Kurikulum dan perubahan sosial dalam pendidikan. *Cakrawala Pendidikan*, 40(2), 301–313.
- Suryaman, M. (2023). Paradigma baru pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. *Cakrawala Pendidikan*, 42(1), 1–12.
- Sutrisno. (2022). Kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 89–98.
- Tomlinson, C. A. (2017). *How to differentiate instruction in academically diverse classrooms* (3rd ed.). ASCD.
- UNESCO. (2022). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report: Technology in education*. UNESCO Publishing.
- Wahyuni, S., Nurkholis, & Hasanah, U. (2022). Kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kependidikan*, 52(3), 321–334.
- Wijaya, A. (2024). Adaptasi guru terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 13(1), 45–56.